

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN RASIO KETERGANTUNGAN FISKAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH****Fahdhi<sup>1</sup>, Edi Abrol<sup>2</sup>, Mukhlis<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Politeknik Negeri LhokseumaweEmail: [mrfahdhi@gmail.com](mailto:mrfahdhi@gmail.com)<sup>1</sup>, [ediabrol@pnl.ac.id](mailto:ediabrol@pnl.ac.id)<sup>2</sup>, [nicekhlis@gmail.com](mailto:nicekhlis@gmail.com)<sup>3</sup>**Abstrak**

Penelitian ini menguji pengaruh efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, dan rasio ketergantungan fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sepanjang 2019-2023. Studi memakai pendekatan kuantitatif kausal dengan data sekunder Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 23 kabupaten/kota. Teknik sampel jenuh menghasilkan 115 observasi data panel. Analisis data memakai regresi data panel dengan Fixed Effect Model melalui aplikasi EViews 13.0. Uji Chow dan uji Hausman sama-sama mengarahkan pemilihan model pada Fixed Effect Model. Hasil estimasi menunjukkan efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ( $t = -0,925$ ;  $p = 0,358$ ). Belanja daerah ( $t = 19,395$ ;  $p = 0,000$ ; koefisien = 73,857) dan rasio ketergantungan fiskal ( $t = 4,866$ ;  $p = 0,000$ ; koefisien = 0,360) masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio efisiensi keuangan daerah. Kenaikan nilai rasio tersebut justru menandakan penurunan mutu efisiensi, bukan perbaikannya, karena rasio efisiensi dihitung dari perbandingan belanja terhadap pendapatan. Belanja daerah tampil sebagai prediktor paling dominan dalam model. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah ( $F = 35,146$ ;  $p = 0,000$ ;  $R^2 = 0,908$ ). Temuan ini menegaskan bahwa ketergantungan fiskal yang tinggi melemahkan disiplin anggaran daerah, sejalan dengan konsep soft budget constraint dan moral hazard dalam teori desentralisasi fiskal. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akuntansi sektor publik serta menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis bukti empiris.

**Kata Kunci:** Efektivitas PAD, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan Fiskal, Kinerja Keuangan Daerah, Regresi Data Panel.

**Abstract**

*This study examines the effect of local own-source revenue (PAD) effectiveness, regional expenditure, and fiscal dependency ratio on the financial performance of district and municipal governments in Aceh Province during 2019-2023. A quantitative causal approach was applied using secondary data from Regional Government Financial Reports covering 23 districts and cities. A saturated sampling technique produced 115 panel observations. Data were analyzed through panel data regression using the Fixed Effect Model in EViews 13.0. Both the Chow test and the Hausman test consistently pointed to the Fixed Effect Model as the most appropriate specification. The estimation results show that PAD effectiveness has no significant effect on financial performance ( $t = -0.925$ ;  $p = 0.358$ ). Regional expenditure ( $t = 19.395$ ;  $p = 0.000$ ; coefficient = 73.857) and fiscal dependency ratio ( $t = 4.866$ ;  $p = 0.000$ ; coefficient = 0.360) each exert a positive and significant effect on the efficiency ratio. A rise in this ratio actually signals*

*declining efficiency rather than improvement, since the ratio is computed as expenditure divided by revenue. Regional expenditure emerges as the most dominant predictor in the model. Simultaneously, the three variables significantly affect regional financial performance ( $F = 35.146$ ;  $p = 0.000$ ;  $R^2 = 0.908$ ). These findings confirm that heavy fiscal dependency weakens budgetary discipline, consistent with the notions of soft budget constraint and moral hazard within fiscal decentralization theory. The study is expected to enrich public sector accounting research and inform evidence-based regional financial policy.*

**Keywords:** PAD Effectiveness, Regional Expenditure, Fiscal Dependency Ratio, Regional Financial Performance, Panel Data Regression.

## A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah pola relasi fiskal antara pusat dan daerah di Indonesia. Kebijakan ini menuntut pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, efektif, dan akuntabel. Kinerja keuangan daerah lantas menjadi tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan desentralisasi fiskal tersebut, tidak sekadar dari sisi capaian target anggaran, melainkan juga dari mutu pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan daerah memakai rasio efisiensi keuangan, yaitu perbandingan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan daerah. Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Aceh memperlihatkan rasio tersebut berfluktuasi sepanjang 2019-2023, dari 86,25 persen pada 2019 naik menjadi 96,12 persen pada 2022, lalu turun ke 94,75 persen pada 2023. Pola naik-turun ini menandakan bahwa stabilitas kinerja keuangan daerah belum tercapai dan memerlukan kajian mendalam atas faktor-faktor yang memengaruhinya.

Tiga faktor diduga berperan dalam membentuk kinerja tersebut. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Data LKPD menunjukkan efektivitas PAD kabupaten/kota di Aceh berkisar antara 53 persen hingga 178 persen selama 2019-2023, sebuah rentang lebar yang mengindikasikan ketimpangan kapasitas pemungutan antardaerah. Belanja daerah menggambarkan kebijakan alokasi sumber daya untuk pembangunan dan pelayanan publik; besarnya belanja tidak otomatis berarti kinerja yang baik apabila tidak diimbangi efisiensi penggunaannya. Rasio ketergantungan fiskal menunjukkan porsi dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, dalam struktur

pendapatan daerah. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mencatat rasio ini berkisar 50 hingga 85 persen di Aceh selama periode yang sama, bahkan ada daerah yang melampaui 80 persen.

Provinsi Aceh memiliki karakteristik fiskal yang khas dibandingkan wilayah lain di Indonesia karena menerima Dana Otonomi Khusus sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum Nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana ini menopang pembiayaan daerah secara signifikan, tetapi berpotensi mengurangi dorongan daerah untuk menggali PAD secara optimal sehingga memperkuat ketergantungan fiskal secara struktural. Kondisi khas inilah yang menjadikan Aceh konteks penelitian yang relevan untuk dikaji lebih jauh.

Kajian terdahulu tentang determinan kinerja keuangan daerah masih menyisakan ketidakkonsistenan hasil. Sebagian studi menemukan pengaruh positif efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan, sementara studi lain melaporkan hasil sebaliknya. Pola serupa berlaku pada variabel belanja daerah dan ketergantungan fiskal, yang hasilnya berubah-ubah bergantung pada objek dan periode penelitian. Kesenjangan ini diperparah oleh keterbatasan kajian yang secara khusus membahas kabupaten/kota di Provinsi Aceh, padahal wilayah ini memiliki struktur pendapatan unik akibat keberadaan Dana Otonomi Khusus. Belum banyak pula penelitian yang menggabungkan ketiga variabel tersebut dalam satu model analisis yang menyeluruh.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menganalisis secara simultan pengaruh efektivitas PAD, belanja daerah, dan rasio ketergantungan fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama 2019-2023 memakai regresi data panel. Tujuan penelitian mencakup empat hal: menguji pengaruh parsial efektivitas PAD, belanja daerah, dan rasio ketergantungan fiskal terhadap kinerja keuangan, serta menguji pengaruh simultan ketiganya. Hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian akuntansi sektor publik sekaligus memberi masukan kebijakan berbasis bukti bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengelola keuangan daerah di wilayah dengan status otonomi khusus.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menguji hubungan sebab akibat antara efektivitas PAD, belanja daerah, dan rasio ketergantungan fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Objek penelitian

mencakup seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yang menyusun serta mempublikasikan LKPD. Populasi berjumlah 23 daerah, terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota. Teknik sampel jenuh menetapkan seluruh populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2015), mengingat jumlahnya yang relatif terbatas dan tersedianya data yang lengkap. Rentang waktu penelitian mencakup 2019 hingga 2023, sehingga terbentuk 115 observasi data panel dari perkalian 23 unit cross-section dengan lima tahun pengamatan.

Data penelitian bersumber dari LKPD kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan diperkuat studi kepustakaan atas buku, artikel ilmiah, dan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Empat variabel dioperasionalkan sebagai berikut. Efektivitas PAD (X1) diukur dari rasio realisasi PAD terhadap target PAD, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Belanja daerah (X2) diukur dari total realisasi belanja daerah, ditransformasikan ke bentuk logaritma natural untuk mengurangi perbedaan skala antardaerah. Rasio ketergantungan fiskal (X3) diukur dari perbandingan pendapatan transfer pusat terhadap total pendapatan daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012. Kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) diukur dari rasio efisiensi keuangan, yaitu perbandingan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan daerah; nilai rasio yang lebih rendah menandakan pengelolaan yang lebih efisien.

Analisis data menempuh empat tahap. Tahap pertama menentukan model regresi data panel terbaik di antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*, melalui uji Chow dan uji Hausman. Tahap kedua menguji asumsi klasik, mencakup uji normalitas dengan metode *Jarque-Bera*, uji multikolinearitas dengan *Variance Inflation Factor*, dan uji heteroskedastisitas dengan pendekatan *Glejser* yang disesuaikan untuk data panel. Tahap ketiga mengestimasi model regresi terpilih dengan persamaan berikut.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 \log(X2_{it}) + \beta_3 X3_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan: Y menyatakan kinerja keuangan daerah, X1 efektivitas PAD,  $\log(X2)$  belanja daerah dalam bentuk logaritma natural, X3 rasio ketergantungan fiskal,  $\alpha$  konstanta,  $\beta_1$  sampai  $\beta_3$  koefisien regresi, dan  $\varepsilon$  komponen error. Tahap terakhir menguji hipotesis melalui uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur daya jelas model. Seluruh pengujian memakai tingkat signifikansi 5 persen dan diolah dengan aplikasi EViews 13.0.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Statistik Deskriptif

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif atas 115 observasi data panel. Variabel kinerja keuangan (Y) memiliki rata-rata 91,38 persen, termasuk kategori “kurang efisien” menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, dengan nilai tertinggi 113,33 persen dan terendah 64,26 persen. Efektivitas PAD (X1) mencatat rata-rata 94,48 persen, tergolong “cukup efektif”, dengan rentang 53,32 hingga 178,01 persen, mengindikasikan ketimpangan kapasitas pemungutan yang lebar antardaerah. Belanja daerah dalam bentuk logaritma (LogX2) memiliki rata-rata 27,67 dengan standar deviasi 0,36, menunjukkan sebaran yang relatif stabil setelah transformasi. Rasio ketergantungan fiskal (X3) mencatat rata-rata 63,78 persen, tergolong kategori “sedang” menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2012, dengan rentang 50,30 hingga 85,36 persen.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

| Statistik | Y      | X1     | LogX2 | X3    |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| Mean      | 91,38  | 94,48  | 27,67 | 63,78 |
| Median    | 97,64  | 94,19  | 27,58 | 61,87 |
| Maximum   | 113,33 | 178,01 | 28,57 | 85,36 |
| Minimum   | 64,26  | 53,32  | 27,04 | 50,30 |
| Std. Dev. | 11,39  | 17,63  | 0,36  | 8,25  |
| Observasi | 115    | 115    | 115   | 115   |

Sumber: hasil olah data dengan EViews 13.0 (2026).

#### 2. Pemilihan Model dan Uji Asumsi Klasik

Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas *cross-section* sebesar 0,0000, di bawah taraf signifikansi 5 persen, sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih dibandingkan *Common Effect Model*. Uji Hausman menguatkan simpulan tersebut dengan nilai *Chi-Square* sebesar 164,89 dan probabilitas 0,0000, yang menandakan FEM lebih konsisten dibandingkan *Random Effect Model*. Kedua uji secara konsisten mengarahkan pemilihan pada FEM, sehingga uji *Lagrange Multiplier* tidak diperlukan.

Uji asumsi klasik menunjukkan model FEM telah memenuhi syarat estimasi yang baik. Uji *Jarque-Bera* menghasilkan nilai 2,60 dengan probabilitas 0,27, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji *Variance Inflation Factor* menunjukkan nilai *Centered VIF* seluruh variabel independen di bawah 1,04, jauh di bawah ambang 10, sehingga model bebas dari multikolinearitas. Uji *Glejser* menghasilkan probabilitas seluruh variabel di atas 0,05, menandakan model bebas dari heteroskedastisitas. Ketiga hasil ini menegaskan bahwa estimasi koefisien regresi memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator*.

### 3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi FEM menghasilkan persamaan berikut.

$$Y = -1973,069 - 0,025 X_1 + 73,857 X_2 + 0,360 X_3$$

Tabel 2 merangkum hasil uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) untuk setiap variabel independen.

**Tabel 2. Hasil Uji t dan Uji F**

| Variabel                 | Koefisien | t / F-hitung | Probabilitas | Keterangan       |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| X1 Efektivitas PAD       | -0,025    | -0,925       | 0,358        | Tidak signifikan |
| X2 Belanja Daerah (Log)  | 73,857    | 19,395       | 0,000        | Signifikan       |
| X3 Ketergantungan Fiskal | 0,360     | 4,866        | 0,000        | Signifikan       |
| Uji F (simultan)         | -         | 35,146       | 0,000        | Signifikan       |

Sumber: hasil olah data dengan EViews 13.0 (2026).

Uji t menunjukkan efektivitas PAD (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ( $t = -0,925$ ;  $p = 0,358$ ), sehingga H1 ditolak. Belanja daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan ( $t = 19,395$ ;  $p = 0,000$ ), sehingga H2 diterima. Rasio ketergantungan fiskal (X3) juga berpengaruh positif dan signifikan ( $t = 4,866$ ;  $p = 0,000$ ), sehingga H3 diterima. Uji F menghasilkan nilai 35,146 dengan probabilitas 0,000, melampaui F tabel sebesar 2,706, sehingga H4 diterima: ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Nilai R-squared sebesar 0,908 menunjukkan model mampu menjelaskan 90,8 persen variasi kinerja keuangan, sementara Adjusted R-squared sebesar 0,882 menegaskan kekuatan penjelasan tersebut tetap tinggi setelah memperhitungkan jumlah variabel dan observasi.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Efektivitas PAD tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Temuan ini bukan berarti PAD tidak penting, melainkan mencerminkan persoalan struktural: kontribusi PAD dalam total pendapatan daerah masih kecil di tengah rata-rata ketergantungan fiskal yang mencapai 84,06 persen. Meski rata-rata efektivitas PAD tergolong “sangat efektif” (100,74 persen), porsi yang kecil membuat perubahan efektivitas tersebut belum cukup memengaruhi rasio efisiensi secara agregat. Kondisi ini selaras dengan konsep *soft budget constraint*, yaitu situasi ketika kucuran dana transfer yang besar melemahkan tekanan anggaran sehingga pemerintah daerah kurang terdorong berinovasi mengoptimalkan PAD, sebuah fenomena yang juga disebut *fiscal laziness* (Wicaksono, 2015). Hasil ini konsisten dengan temuan Mayanti dkk. (2023) dan Azhar (2021) yang meneliti wilayah Aceh, tetapi berbeda dengan temuan Yeyen dkk. (2025) di Sumatera Selatan dan Nur dan Suwardi (2024) di Jawa Timur, yang mencatat pengaruh positif signifikan PAD karena struktur ekonomi daerah tersebut lebih beragam sehingga porsi PAD terhadap total pendapatan jauh lebih besar.

### 2. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Belanja daerah berpengaruh positif dan paling dominan terhadap rasio efisiensi keuangan. Karena rasio efisiensi dihitung dari perbandingan belanja terhadap pendapatan, hubungan positif ini sebetulnya menandakan penurunan efisiensi, bukan perbaikan kinerja. Perlu dicatat bahwa besarnya nilai t-statistik pada variabel ini turut dipengaruhi oleh hubungan matematis antara belanja daerah sebagai komponen pembilang dalam perhitungan rasio efisiensi itu sendiri, sehingga sebagian pengaruh yang teramati bersifat mekanis, bukan murni perilaku fiskal yang berdiri sendiri. Temuan ini sejalan dengan mekanisme *flypaper effect* yang dilaporkan Armawaddin dkk. (2017) dan Septriani (2023), yaitu kecenderungan pemerintah daerah menaikkan belanja lebih responsif terhadap kenaikan dana transfer dibandingkan kenaikan PAD. Hasil ini juga konsisten dengan Mayanti dkk. (2023) di Aceh serta Yeyen dkk. (2025) di Sumatera Selatan.

### 3. Pengaruh Rasio Ketergantungan Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio efisiensi, yang secara substantif berarti semakin tinggi ketergantungan daerah pada transfer pusat, semakin rendah mutu efisiensi keuangannya. Pola ini terjadi karena dana transfer, terutama Dana Alokasi Khusus yang bersifat *earmarked*, mewajibkan daerah merealisasikan belanja sesuai jadwal dan bidang tertentu, sehingga mendorong kenaikan proporsi belanja terhadap pendapatan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *moral hazard*, yaitu melemahnya insentif fiskal daerah ketika jaminan pendanaan eksternal tersedia secara stabil. Hasil ini sejalan dengan temuan Megasari (2025) dan Santi dkk. (2024), tetapi berbeda dengan Melmambessy (2022) di Kota Jayapura, yang memakai pendekatan deskriptif pada satu daerah sehingga kurang mampu menangkap variasi antarwilayah sebagaimana pendekatan *Fixed Effect Model* dalam penelitian ini.

### 4. Pengaruh Simultan Ketiga Variabel terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Ketiga variabel secara bersama-sama membentuk kerangka penjelas yang kuat atas variasi kinerja keuangan daerah, dengan daya jelas mencapai 90,8 persen. Temuan ini menegaskan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami dari satu aspek fiskal saja. Perbaikan kinerja memerlukan reformasi fiskal yang menyeluruh: memperluas basis PAD, meningkatkan mutu belanja melalui penganggaran berbasis kinerja, serta menurunkan ketergantungan fiskal secara bertahap. Temuan ini memperkuat Teori Desentralisasi Fiskal (Wahyudi dkk., 2023) dengan menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi bergantung pada keseimbangan tiga dimensi tersebut, sejalan dengan hasil Mayanti dkk. (2023) di Aceh, Santi dkk. (2024) di Kalimantan Timur, dan Ramadhan dkk. (2022) di Jawa Barat.

## D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan empat hal. Pertama, efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Aceh ( $t = -0,925$ ;  $p = 0,358$ ), akibat kecilnya kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah. Kedua, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan ( $t = 19,395$ ;  $p = 0,000$ ; koefisien = 73,857), meski pengaruh tersebut sebagian bersifat mekanis akibat keterkaitan konstruksi dengan rasio efisiensi. Ketiga, rasio ketergantungan fiskal berpengaruh positif dan signifikan ( $t = 4,866$ ;

$p = 0,000$ ; koefisien = 0,360), yang secara substantif menandakan penurunan disiplin fiskal daerah. Keempat, ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah ( $F = 35,146$ ;  $p = 0,000$ ;  $R^2 = 0,908$ ).

Bagi pemerintah kabupaten/kota di Aceh, penguatan kemandirian fiskal perlu ditempuh melalui perluasan basis pajak dan retribusi daerah, digitalisasi sistem pemungutan, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah. Mutu belanja daerah perlu ditingkatkan melalui penganggaran berbasis kinerja dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Target penurunan rasio ketergantungan fiskal juga perlu dijadikan indikator kinerja utama dalam dokumen perencanaan daerah. Bagi pemerintah pusat, evaluasi mekanisme Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum perlu memperhitungkan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan kemandirian fiskalnya. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti opini audit BPK atau indeks kapasitas fiskal, memperluas cakupan wilayah dan periode pengamatan, serta memakai indikator kinerja keuangan yang tidak memiliki keterkaitan matematis langsung dengan variabel belanja daerah, agar pengaruh belanja terhadap kinerja keuangan dapat diuji secara lebih independen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis flypaper effect belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(2), 164–174.
- Mayanti, F., Rizky, F., & Ariansyah, R. (2023). Pengaruh kemandirian, efektivitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. *Singkite Journal*, 2(2), 31–38.
- Megasari, D. (2025). Pengaruh belanja modal, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemda di provinsi se-Indonesia tahun 2019–2023. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 24(9).
- Melmambessy, D. (2022). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura ditinjau dari rasio kemandirian daerah, ketergantungan daerah, desentralisasi fiskal dan efektivitas. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 10–15.

- Nur, A. S., & Suwardi, H. B. (2024). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 18(1), 41.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Keuangan Daerah.
- Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 508–521.
- Santi, Y., Prasetyo, A., Nur Widhi, E., Hartanto, & Rahmatiyah. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus di Kalimantan Timur masa pandemi COVID-19). *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 4(2), 37–48.
- Septriani, S. (2023). Analisis fenomena flypaper effect pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Widya Balina*, 8(2), 944–959.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyudi, T., Nawawi, M., & Pohan, E. S. (2023). Desentralisasi fiskal dan efisiensi anggaran: Tinjauan sistematis. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat (DEKAT)*, 2(2), 32–49.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas organisasi sektor publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 75–90.
- Yeyen, Y., Sari, K. R., & Choiruddin, C. (2025). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 3(2), 2344–2359.